BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Alasan Utama Pemerintah Indonesia Melakukan Kerjasama Dengan Jepang Dalam Kerangka IJEPA

Negosiasi atau perundingan IJEPA antara tim perunding Indonesia dan Jepang sudah berhasil diselesaikan pada tanggal 22 Juni 2007 yang selanjutnya diikuti dengan penyesuaian legalitas oleh kedua belah pihak. Tahap selanjutnya adalah ratifikasi oleh parlemen masing – masing negara sebelum kesepakatan tersebut betul – betul dapat diimplementasikan. Menteri Perindustrian MS. Hidayat mengatakan Indonesia bisa memanfaatkan kerjasama ekonomi yang komprehensif atau EPA antara pemerintah Indonesia dan Jepang untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan industri di dalam negeri agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi industri yang berdaya saing tinggi di pasar dunia.

Prinsip EPA adalah keterbukaan pasar di Jepang dan di Indonesia secara timbal balik serta peningkatan kapasitas Indonesia dengan bantuan pihak Jepang. Dengan demikian kita harapkan dengan EPA tersebut berbagai produk yang selama ini sulit atau bisa dipastikan tidak bisa masuk ke pasar Jepang, maka dengan adanya EPA produk – produk tersebut bisa masuk ke pasar Jepang. Hal itu berarti menambah komoditi ekspor Indonesia ke Jepang. Mengingat Jepang merupakan negeri yang kaya, berbeda dengan mengekspor ke negeri China, jadi lebih menguntungkan.

4.1.2 Jepang Sebagai Mitra Dagang Utama Bagi Indonesia

Kerjasama Indonesia – jepang bukanlah sesuatu yang baru bagi kedua belah negara. Sudah sejak lama Indonesia dan Jepang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi di sektor industri manufaktur, bahkan juga pengembangan usaha kecil dan menengah. Kesepakatan diantara kedua belah negara antara Indonesia dengan Jepang dilakukan karena keduanya telah memiliki hubungan ekonomi yang sangat lama. Alasan lainnya tentu karena masing – masing negara menganggap negara mitra adalah negara yang penting bagi ekonominya.

Terlebih lagi sejak dimulai dari tahun 1954, dalam bentuk penerimaan trainee untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, komunikasi transportasi, pertanian dan kesehatan. Bantuan ODA Jepang yang telah memberikan kontribusi besar melalui di bidang pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi. Misalnya, pada saat krisis ekonomi melanda Asia sejak Agustus 1997, Jepang membantu Indonesia yang sedang berusaha keluar dari krisis dalam bentuk pinjaman khusus, perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi pemerintah, dan lain-lain. Begitu pula ketika gempa besar dan tsunami dari lautan Hindia melanda pulau Sumatra pada Desember 2004, Jepang menyediakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana sebesar 640 juta US Dollar. Selama ini, secara kumulatif, bantuan Jepang kepada Indonesia berjumlah 29,5 milyar US Dollar (total kumulatif sampai tahun 2006), oleh karena itu, bagi Indonesia, Jepang adalah negara donor terbesar, demikian juga bagi Jepang, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar. Dengan latar belakang inilah,

Jepang dan Indonesia telah memupuk persahabatan selama setengah abad, kedua negara ini telah menjadi mitra penting secara timbal balik

Perkembangan ekonomi yang semakin global diwarnai dengan meningkatnya arus perdagangan baik di tingkat multilateral, regional, maupun bilateral. Blok perdagangan, pasar bersama, dan kesepakatan perdagangan bebas yang bertumpu pada sinergi kepentingan antar pihak atau antar negara yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dunia. Namun pada prinsipnya keterlibatan Indonesia di dalam berbagai kerjasama internasional tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus ditaati.

4.1.3 Akses Pasar Untuk Produk Indonesia

Akses pasar untuk produk Indonesia ke pasar ekspor terbesar mewakili 20% dari ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia (13%).

Selain itu dengan adanya IJEPA Indonesia memiliki beberapa kepentingan yaitu:

- Kerjasama ini akan meningkatkan investasi dari Jepang
- Kerjasama ini akan meningkatkan kapasitas daya saing Indonesia secara umum maupun di sektor-sektor tertentu, antara lain:
    1. Peningkatan kapasitas, khususnya di area standardisasi produk dan pengujian
    2. kebersihan dan standar kesehatan untuk produk makanan dan minuman

3. Pelatihan ketrampilan dan teknologi di sektor manufaktur yang akan meningkatkan mutu produk Indonesia di pasar domestik dan internasional
4. Program-program peningkatan kapasitas di bidang energi, industri, pertanian, promosi ekspor dan investasi dan pengembangan UKM

Disamping itu isu liberalisasi barang dan jasa akan diimplementasikan dalam bentuk penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Dalam perjanjian IJEPA hampir semua pos tarif ditargetkan untuk segera dihapuskan. Jepang telah memasukkan lebih dari 90 persen pos tarif yang akan setara dengan 99 persen dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Hampir sama dengan Jepang, Indonesia juga menyepakati lebih dari 93 persen pos tarif yang akan setara dengan 92 persen dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia.

4.1.4 Untuk Merangsang Pertumbuhan Sektor Perikanan

IJEPA memberi kepastian akses pasar yang lebih prefensial dan luas dibandingkan dengan program seperti *Generalized System of Preference* (GSP), dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di ASEAN, sedangkan Brunei dan Vietnam menyusul.

Kerjasama dalam peningkatan kapasitas untuk memperbaiki daya saing indonesia sehingga keuntungan dari kerjasama optimal bagi Indonesia, dan keuntungan dapat diraih oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat termasuk usaha kecil menengah (UKM).

Upaya – upaya meningkatkan daya saing dan sistem jaminan mutu yang profesional disertai peningkatan produktivitas dan daya saing secara nasional perlu dijadikan sebagai target bersama dalam wadah *Indonesian Fishery Incorporated.*

Strategi pemerintah Indonesia untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor – sektor migas dan nonmigas di Indonesia agar dapat merebut pangsa pasar dalam negeri dan dibeberapa negara tujuan ekspor antara lain:

1. Gerakan nasional memasyarakatkan makan ikan
2. Promosi
3. Pengembangan jaringan distribusi
4. Pembangunan kelembagaan pemasaran
5. Pengembangan informasi pasar.

Selain itu bagi Jepang, Indonesia adalah pasar yang sangat penting. Meskipun telah mengalami penurunan dibanding dekade lalu, bagi Jepang Indonesia masih termasuk negara importir terbesar ke-6 (4.3%), setelah China, AS, Arab Saudi, Australia dan UEA.

4.2 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Sektor Perikanan Dalam Kerangka IJEPA

Upaya yang dapat ditempuh pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan kesepakatan ini yaitu menciptakan suasana yang kondusif bagi para pelaku usaha di sektor perikanan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kondusif dalam pengertian terciptanya

kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha yang dapat meningkatkan keinginan pelaku usaha di sektor perikanan, misalnya seperti:

1. Pembenahan Dari Sisi Birokrasi Dan Prosedur Ekspor

   Pembenahan yang dilakukan oleh pihak birokrasi adalah dengan melakukan pemberantasan pungutan-pungutan liar dan pemangkasan prosedur ekspor yang terlalu panjang

2. Menghilangkan Jalur Distribusi Yang Tidak Efektif

   Dengan menghilangkan jalur distribusi yang tidak efektif maka akan mengurangi dampak rusaknya serta tidak segarnya ikan dari daerah ke negara tujuan ekspor Indonesiake Jepang.

3. Memberikan Insentif – Insentif Bagi Industri Dan Pemasaran

   Dalam rangka meningkatkan keinginan pelaku usaha di sektor perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan memberikan insentif-insentif bagi industri dan pemasaran seperti usaha kecil menengah (UKM)

4. Penurunan Pajak Ekspor

5. Meningkatkan Lagi Sarana Dan Infrastruktur Transportasi

   Peningkatan sarana dan infrastruktur transportasi diantaranya dengan memperbaiki kapal – kapal nelayan serta mempermudah pendistribusian bahan bakar minyak untuk kapal – kapal tersebut.

6. Meningkatkan Terus Pengawasan Atas Sumberdaya Laut

   Peningkatan pengawasan terutama dari penangkapan asing ilegal, yang berarti peningkatan kemampuan aparat dan segala kelengkapannya

7. Penyetaraan Standar Mutu Dalam Negeri Dan Standar Mutu Luar Negeri

   Penyetaraan standar mutu yang dimaksud diantaranya adalah ikan atau udang yang diimpor harus segar, bersih dan bebas dari cemaran bakteri.

8. Kebijakan Ke Dalam Sektor Moneter

   Kebijakan ke dalam sektor moneter yaitu mempermudah akses para pelaku usaha di sektor perikanan terhadap modal dan menurunkan tingkat suku bunga bank

9. Meningkatkan Lobby – Lobby Pemerintah

   Peningkatan lobby – lobby pemerintaha adalah untuk meningkatkan *bargaining position* Indonesia di mata mitra dagang

10. Menciptakan Strategi – Strategi Baru

    Diantaranya adalah dengan meningkatkan kemampuan dalam hal *market intellegence*, dan pemasaran luar negeri untuk memenangkan persaingan dengan negara lain

11. Pengembangan produk secara terus menerus dan komitmen yang kuat untuk terus menjaga mutu, daya saing, dan efisiensi

12. Kebijakan lainnya yang dapat melindungi industri riil dalam negeri dari dampak buruk adanya impor.

    Dampak buruk impor dalam sektor perikanan adalah dimana pengusaha industri perikanan lokal kalah bersaing dengan produk

impor yang kualitasnya lebih baik dengan harga yang relatif terjangkau.

Oleh karena itu dengan adanya kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam kerangka IJEPA, pemerintah Indonesia akan berupaya memperoleh pembukaan pasar Indonesia di Jepang di sektor perikanan melalui penghapusan tarif bea masuk yang lebih cepat dari negara lain yang belum mempunyai kerjasama perdagangan dengan Jepang. Sehingga dengan upaya tersebut akan membuka peluang pasar yang lebih besar.

Sektor perikanan khususnya pada komoditas udang dan tuna adalah salah satu ekspor terbesar yang terkait dengan kerjasama IJEPA. Kedudukan Jepang sebagai tujuan ekspor komoditas perikanan dari Indonesia memang tergolong sangat besar, biasanya yang diekspor ke Jepang adalah tuna yang masih segar untuk dibuat sashimi atau sushi. Pada tahun 2008, jika dilihat dari nilai ekspornya, tuna menempati urutan kedua setelah udang. Secara nasional, total produksi tuna untuk ekspor sampai Oktober 2008 mencapai 130.056 ton dengan nilai sebesar 347,189 juta dollar AS.

Selain Jepang sebagai tujuan ekspor Indonesia di sektor perikanan, ada juga beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, lalu ke negara – negara lainnya seperti timur tengah dan yang lainnya, hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.1

Tujuan Ekspor Perikanan Indonesia

(Tahun 2006 – 2010)

NO	Negara Tujuan	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Volume (Ton)	Nilai (US$ 1000)	Volume (Ton)	Nilai (US$ 1000)	Volume (Ton)	Nilai (US$ 1000)	Volume (Ton)	Nilai (US$ 1000)	Volume (Ton)	Nilai (US$ 1000)
1	Jepang	116,006	630,791	117,112	590,434	113,492	613,416	118,539	617,775	118,260	626,813
2	USA	121.291	689.882	125.789	762.264	143.641	940.681	125.929	772.650	124.828	829.388
3	Uni Eropa	80,105	294,951	79,368	287,647	79,233	322,822	73,546	293,344	75,587	307,923
4	Negara Lainnya	609,075	487,848	532,060	618,575	519,151	802,048	563,300	782,432	733,749	900,646
5	Total	926,477	2,103,472	854,329	2,258,920	911,674	2,699,683	881,413	2,446,202	1,053,421	2,664,770

Sumber:Kementerian Kelautan dan Perikanan, data diolah peneliti.

4.3 Implementasi IJEPA Dalam Sektor Perikanan di Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, luas laut Indonesia lebih besar daripada daratannya. Dengan panjang garis pantai yang sekitar 81.000 km, potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya laut sangat besar. Dua komoditas yang antara lain udang dan tuna inilah yang menjadi ketertarikan Jepang ke Indonesia, karena penduduk Jepang memerlukan asupan protein yang sangat tinggi dan hal ini memposisikan Jepang melakukan ekspansi kerjasama

dalam perdagangannya. Tingginya nilai jual tuna, jenis ikan yang paling banyak dicari dan dicuri dari laut Indonesia, disebabkan karena rasanya yang lezat. Selain itu, banyak kandungan zat gizi yang mampu menyehatkan orang dewasa dan mencerdaskan anak-anak. Ikan merupakan bahan pangan yang sangat tinggi peminatnya. Salah satu jenis ikan yang banyak diminati, baik di pasar lokal maupun internasional, adalah ikan tuna. Yang dalam bahasa latinnya dikenal sebagai *Thunnus sp* dan dalam bahasa Inggris disebut *skipjack*. Ikan tuna mempunyai daerah penyebaran sangat luas atau hampir disemua daerah tropis maupun subtropis.

Oleh karena hal itulah Indonesia dengan Jepang membentuk suatu kerangka kerjasama IJEPA yang telah menghasilkan 11 perundingan yang pengimplementasiannya di berbagai sektor diantaranya pada sektor perikanan Indonesia. Dari 11 perundingan yang ada, dua diantaranya yang terkait dengan sektor perikanan adalah:

4.3.1 Implementasi IJEPA di Bidang Perundingan *Trade in Goods*: *Tariffs And Non Tariff Measures, Rule Of Origin Trade Remedies*

Salah satu yang dibahas dalam perundingan kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam kerangka IJEPA adalah perdagangan dalam barang yaitu mengenai tarif dan non tarif, ketentuan asal produk, penyelesaian *dispute* mengenai mutu barang. Di dalam suatu perdagangan antara Indonesia dengan Jepang khususnya pada sektor perikanan Indonesia memberlakukan tarif bea masuk dimana hampir semua pos tarif ditargetkan untuk segera dihapuskan. Isu tarif terutama bea masuk

dalam kerjasama IJEPA ini menjadi sangat penting dan akan menjadi peluang serta manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, dan juga akan memberi perluasan perdagangan dan kegiatan – kegiatan yang terkait dengan perdagangan antara kedua negara. Adapun jadwal penurunan tarif bea masuk Indonesia – Jepang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.1

Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk Indonesia – Jepang

Kategori	Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk
A	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% pada tanggal implementasi.
B3	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B5	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B7	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B10	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B15	Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
X	Dikecualikan dari penurunan tarif Bea Masuk, berlaku tarif MFN.
P	Tarif Bea Masuk diturunkan dengan mengikuti catatan-catatan

Sumber : Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, diakses melalui http://www.tarif.depkeu.go.id/?home, data diolah peneliti

Keterangan:

1. Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5%diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:
    - Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi
    - Penurunan tahun berikutrnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari
    - Tarif bea masuk menjadi 0% pada tanggal 1 Jnuari 2010

    Dengan rincian sebagai berikut:
    - 10% pada tanggal implementasi
    - 8% pada tanggal 1 Januari 2009
    - 6% pada tanggal 1 Januari 2010
    - 4% pada tanggal 1 Januari 2011
    - 0% pada tanggal 1 Januari 2012
2. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS).
3. Sekitar 72 produk perikanan akan diturunkan tarif bea masuknya ke pasar Jepang secara bertahap dalam waktu lima sampai tujuh tahun setelah penandatanganan kerjasama (IJEPA) pada Agustus 2007.
4. 72 produk perikanan yang diantaranya termasuk tuna dengan udang, yaitu sebesar:

- 3,5% untuk tuna segar dan 9,5% untuk tuna kaleng
- Udang senilai 845 juta dolar AS sekitar 47%
- Ikan tuna beku 228 juta dolar AS sekitar 12%
- Ikan tuna segar(dingin) 225 juta dolar sekitar 12%
- fillet dan daging ikan 207 juta dolar sekitar 11%

Tarif – tarif tersebut telah diturunkan oleh Indonesia – Jepang adalah dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor perikanan. Dimana daerah pengekspor terbesar di Indonesia wilayah barat masing-masing adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung dan Jawa Tengah, sedangkan lima besar daerah pengekspor di bagian timur yakni Sulawesi Selatan, Bali, Maluku, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

4.3.2 Implementasi IJEPA Di Bidang Perundingan *Cooperation*

Selain perdagangan dalam barang yaitu mengenai tarif dan non tarif, ketentuan asal produk, penyelesaian *dispute* mengenai mutu barang, implementasi IJEPA di bidang perundingan untuk sektor perikanan adalah *cooperation*.

Cooperation atau bisa diartikan kerjasama, yaitu kedua pihak akan melakukan serta mempromosikan suatu kerjasama bilateral bagi pengembangan kapasitas dalam berbagai bidang, salah satunya adalah di sektor perikanan, dengan maksud untuk meningkatkan kemitraan ekonomi antara kedua belah pihak.

Kerjasama antara kedua belah pihak bisa terlihat dari volume dan nilai ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2006 – 2010 pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.2

Volume dan Nilai Ekspor Indonesia

Komoditas Udang dan Tuna (2006-2010)

Rincian Item	Tahun					Kenaikan Rata – rata (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	2006-2010
Udang	169,329	157,545	170,583	150,989	140,940	-4.21
Tuna	91,822	121,316	130,056	131,550	116,320	7.22
Volume (Ton)	**261.151**	**278.861**	**300.639**	**282.539**	**257.260**	**3.01**
Udang	1,115,963	1,029,935	1,165,293	1,007,481	989,708	-2.47
Tuna	250.567	304.348	347.189	352.300	355.746	9.45
Nilai (US$ 1.000)	**1.366.530**	**1.334.283**	**1.512.482**	**1.359.781**	**1.354.454**	**6.98**

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), data diolah peneliti.

Keterangan:

- Tahun 2006 udang (169,329 Ton senilai US$ 1,115,963), dan tuna (91,822 Ton senilai US$ 250.567) dengan total jumlah 261.151 Ton senilai US$ 1.366.530 yang jika dipersentasekan total volume udang dan tuna 3.01% Ton dengan nilai 6.98%. Pada tahun 2006 ini terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini

dikarenakan konsumen Jepang akhir – akhir ini seleranya mulai beralih, sehingga permintaan untuk komoditi ini melemah.

- Kenaikan udang dan tuna mulai terlihat pada tahun 2007 dan 2008 hal ini dikarenakan adanya penandatanganan kesepakatan IJEPA pada tahun 2007, ditambah Jepang memberikan fasilitas bea masuk untuk produk perikanan Indonesia.
- Penurunan kembali terlihat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, untuk ekspor udang yang turun dikarenakan serangan penyakit udang yang mengakibatkan rendahnya produksi udang di Indonesia. Sedangkan untuk tuna dikarenakan masalah biaya pengiriman yang sangat tinggi, dari pengumpul di berbagai daerah sampai ke eksportir. Selain itu juga, akibat keterbatasan fasilitas infrastruktur pengiriman ikan dari daerah ke beberapa eksportir sehingga menyebabkan kualitas tuna menjadi turun.

4.4 Kendala – Kendala Dalam Implementasi IJEPA

4.4.1 Kelemahan Industri Perikanan Yang Dilakukan Indonesia Dalam Pengimplementasian IJEPA

Pengimplementasian dari suatu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pihak Jepang dalam kerangka kerjasama IJEPA bukan tidak mungkin menemui kendala – kendala dalam pelaksanaannya.

Kesepakatan IJEPA maupun kesepakatan ekonomi Indonesia dengan negara manapun pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat besar bila dilakukan tanpa arah dan strategi yang jelas, yaitu:

1. Untuk meningkatkan pangsa pasar komoditas perikanan Indonesia di Jepang, nampaknya pihak Indonesia perlu Meninggalkan *mindset* yang menitikberatkan kepada tarif, dimana tarif dianggap sebagai sebagai senjata menghadapi persaingan, maupun batu sandungan. Waktunya untuk bersiap menghadapi *barrier* dari sisi non-tarif. Nampaknya di masa mendatang *issue* yang cenderung akan diangkat sebagai senjata oleh negara pesaing dan dapat menjadi batu sandungan adalah adanya dan kecenderungan akan dimunculkannya lebih banyak berbagai macam hambatan non-tarif terhadap ekspor komoditas sektor perikanan Indonesia
2. Perlu pula mengembangkan *Good Brand Image* (citra yang baik) bagi produk Indonesia umumnya, dan khususnya komoditas sektor perikanan Indonesia di mata dunia umumnya dan Jepang khususnya, melalui berbagai macam kegiatan promosi dan penerangan yang menginformasikan mengenai kualitas dari komoditas sektor perikanan Indonesia, yang tentunya hal tersebut perlu juga didukung oleh berbagai usaha peningkatan mutu komoditas sektor perikanan Indonesia. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu cara untuk merebut pangsa pasar dunia sekaligus mengatasi berbagai

hambatan non-tarif yang sering berasal dari kekurangan informasi negara tujuan ekspor akan produk-produk Indonesia.

Karena pada dasarnya strategi industrilah yang akan menentukan apakah kerjasama ekonomi akan lebih banyak memberikan manfaat atau justru hanya akan menimbulkan kerugian. Satu hal yang pasti, pada saat melakukan IJEPA, Jepang telah siap dengan strategi dan daftar kepentingan atas Indonesia. Tidak heran bila kesepakatan liberalisasi perdagangan dalam IJEPA telah memberikan keuntungan yang lebih nyata kepada pihak Jepang dibanding Indonesia.

Sementara bagi Indonesia, sulitnya ekspor produk manufaktur dan perikanan untuk masuk pasar Jepang, pada umumnya bukan karena tingginya tarif bea masuk. Tetapi lebih banyak terkendala oleh hambatan non-tarif bea masuk seperti standardisasi produk, juga isu kualitas dan kesehatan. Sehingga, meskipun dalam IJEPA jumlah pos tarif bea masuk impor di Jepang yang diturunkan sudah hampir 100%, penurunan tarif bea masuk ini tidak memberikan manfaat langsung yang signifikan bagi Indonesia. Semestinya dalam kesepakatan IJEPA, Indonesia lebih fokus pada negosiasi untuk dapat menembus berbagai persyaratan sulit yang menjadi hambatan non-tarif. Saat ini hambatan non-tarif yang dilakukan oleh setiap negara sudah semakin canggih, sehingga sangat sulit dideteksi sebagai kebijakan proteksi. Oleh karenanya diperlukan strategi dan upaya keras bagi Indonesia untuk menembusnya.

Pilihan untuk sekedar mengeskpor bahan baku akan mengakibatkan Indonesia tidak memiliki peluang yang luas untuk menciptakan nilai tambah. Dengan mengekspor bahan baku dan bahan mentah, maka industri manufaktur

Indonesia tidak akan berkembang. Sebagai konsekuensinya, Indonesia bukan hanya tidak mampu menciptakan nilai tambah tinggi, tetapi tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pendapatan yang semakin besar. Tambahan lagi, pada saat Indonesia mengekspor bahan – bahan baku dan mentah, maka Indonesia juga sedang mengekspor peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah. Hal ini sangat berbeda dengan China yang mampu menangkap aliran investasi dari Jepang, juga berhasil memanfaatkan investasi tersebut sebagai modal untuk membangun industri pengolahannya. Dengan strategi ini berbagai kekayaan bahan mentah yang dimiliki dapat diolah dan memberikan nilai tambah yang besar dan kesempatan kerja yang luas bagi China. Juga mampu mewujudkan diri sebagai hubungan bagi Industri manufaktur dunia. Liberalisasi dan kerjasama ekonomi yang dipersiapkan dengan matang, telah memberi manfaat tidak hanya bagi negara maju tetapi juga negara berkembang yang menjadi mitranya.

4.4.2 Tidak Berimbangnya Posisi Tawar Kedua Belah Negara

Sebagaimana diketahui bahwa dalam FTA dan EPA, yang umumnya dilakukan antara negara maju dan berkembang posisi tawar negara berkembang hampir selalu lebih lemah karena kesepakatan tersebut tidak mempertimbangkan isu perbedaan masalah struktural dan tingkat kemajuan ekonomi. Karena itu, negara berkembang harus sangat cermat dan hati – hati sebelum membuat kesepakatan. Agresifitas Indonesia dalam kerjasama IJEPA ini yang tidak

didahului dengan kesiapan strategi dan kebijakan industri yang jelas, sangat mengkhawatirkan.

Kerjasama Indonesia Jepang dalam IJEPA, semestinya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kerjasama Indonesia. Tetapi dikarenakan Indonesia memiliki strategi yang lemah yang dalam artian Indonesia dengan Jepang dalam posisi yang tidak seimbang (asimetris) dalam menghadapi kerjasama tersebut, akhirnya mengakibatkan kurang efisiennya keuntungan yang didapat.

Bila tidak dilakukan koreksi pada kebijakan IJEPA, ekonomi Indonesia justru akan mengalami kemunduran. Dan jika tidak dilanjuti dengan tegas dan tanpa ada prosedur tentang kebijakan serta strategi pemerintah di produk perikanan maka akan mengakibatkan turunnya daya saing. Dengan menurunnya daya saing produk perikanan, maka produk ekspor Indonesia yang memiliki daya saing tinggi akhirnya hanya tinggal sumberdaya alam mentah. Bila Indonesia tidak mau menghentikan sejenak penandatanganan kerjasama ekonomi baru dengan negara – negara maju, dan tidak mau segera membuat strategi dan kebijakan – kebijakan, maka Indonesia harus bersiap – siap untuk sekedar menjadi negara penyedia kebutuhan energi bahan mentah dan bahan baku bagi Jepang dan juga negara – negara mitra lainnya dalam berbagai kerjasama.

4.5 Permasalahan Ekspor Perikanan Khususnya Pada Komoditas Udang dan Tuna Indonesia ke Jepang

Globalisasi perdagangan dunia, meningkatnya perkembangan teknologi produksi, penanganan dan distribusi bahan pangan serta kesadaran akan

pentingnya bahan pangan yang aman dan bekualitas menempatkan keamanan pangan dan jaminan mutu sebagai prioritas bagi banyak negara. Perkembangan ini berdampak pada semakin ketatnya pengawasan dari negara importir terhadap keamanan pangan khususnya di bidang sanitasi dan *hygene*. peraturan yang disyaratkan negara importir seringkali menjadi penghambat dalam perdagangan. Negara berkembang yang umumnya merupakan eksportir utama produk perikanan seringkali dihadapkan pada penolakan akibat kompleksitas program sanitasi dan persyaratan mutu dari negara tujuan ekspor. Selain itu tidak harmonisnya standar dan sistem yang digunakan pada negara tujuan ekspor juga menghambat perdagangan internasional.

Permasalahan yang timbul diantaranya adalah:

1. Persaingan industri perikanan, khususnya udang, ke depan yang juga pasar utamanya adalah Jepang akan lebih ketat. Komoditi perdagangan udang dunia saat ini telah bergeser dari 5-6 spesies menjadi 2-3, terutama dengan meluasnya budidaya udang introduksi seperti *vanamei*. Industri budidaya udang nasional juga sedang bergeser dari spesies lokal (udang windu) ke udang *vanamei*. Dari sisi pasar, keseragaman spesies menyebabkan persaingan terjadi hanya pada tingkat harga. Bahkan harga udang dunia saat ini telah bergeser turun dari rata-rata US$ 11,2/kg pada tahun 2000 menjadi US$ 6,5 di tahun lalu dihitung dari data yang dilaporkan. Tentu saja negara-negara yang mampu memproduksi udang dengan harga yang lebih murah akan menjadi pemain utama dan China saat ini sedang bergairah dengan

mulai mendominasi pasar udang dunia. Namun demikian, isu-isu keamanan pangan dan kecurangan dalam perdagangan akan tetap menjadi faktor penentu berikutnya.

2. Untuk tuna, peluang pasar tetap terbuka bagi para produsen tuna. Namun demikian ada empat tantangan:
   - Tekanan harga bahan bakar minyak akan membatasi kemampuan produksi tuna Indonesia.
   - Pada saat bersamaan tekanan masyarakat dunia yang menginginkan ekploitasi tuna yang lebih bertanggungjawab juga akan semakin kencang. Komunitas masyarakat perikanan international seperti *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) misalnya, bahkan telah berhasil memaksa Jepang menurunkan kuotanya untuk tuna sirip biru dari selatan ini dari 6000 ton per tahun menjadi hanya separuh tahun 2006 yang lalu. Imbasnya dikhawatirkan akan mengalir pada jenis dan negeri lainnya termasuk industri tuna kita.
   - Persaingan di tingkat wilayah juga semakin ketat karena negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia sudah mengalokasikan dana untuk perikanan tuna dan bahkan berani menarik industri tuna nasional dengan subsidi BBM jika bersedia pindah ke Malaysia. Thailand juga telah berancang-ancang dengan akan selesainya pembangunan pelabuhan perikanan Puket. Vietnam dengan dukungan Jepang juga merencanakan pengembangan pelabuhan

perikanan tuna modern dengan nilai mencapai US$ 5 juta. Kitapun tentu masih menaruh prioritas yang besar pada industri tuna.

- struktur industri perikanan tuna kita sangat lemah, bahkan sangat tergantung pada aktivitas perikanan dari negara lain. Lebih disayangkan lagi aktivitas perikanan asing ini sulit dibedakan antara yang berijin dan yang mencuri. Tidaklah mengherankan jika kita sering berkeluh kesah tentang pencurian ikan yang merugikan negara triliunan rupiah. Karena itu, dalam kerangka kerjasama kedua negara upaya mengurangi permasalahan dan aktivitas yang dikenal dengan istilah *Illegal, Unregulated and Unreported* (IUU) ini dapat menjadi salah satu agenda bersama. Kerjasama bilateral dan mungkin regional dapat juga dilakukan baik dengan memberi tekanan pada para penangkap dan penjual hasil ikan curian tersebut juga dari sisi teknis.

3. Tingkat konsumsi produk perikanan penduduk Jepang yang berkisar 125 kg perkapita, memposisikan Jepang untuk melakukan ekspansi kerjasama perdagangannya, tak terkecuali dengan Indonesia. IJEPA adalah instrumen strategis bagi Jepang untuk mengendalikan perdagangan ikan di kawasan Asia, khususnya Indonesia. Apalagi Indonesia mengekspor lebih dari 50% produk perikanan ke Jepang, termasuk jenis Southern Bluefin Tuna (SBT). Situasi menurunnya produksi perikanan Jepang mestinya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia. Sejak 1985-1990, Jepang terus mengimpor

produk perikanan guna memenuhi asupan gizi protein penduduknya. Sebaliknya, dengan tingkat konsumsi per kapita sebesar 26 kg dan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, tak bijak jika pemerintah mengabaikan kebutuhan protein anak-anak bangsa dengan lebih berorientasi ekspor. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, hal pokok yang mesti dilakukan adalah memberikan sumber protein ikan kualitas tinggi kepada anak-anak Indonesia. Pada konteks inilah, Indonesia harus bernegosiasi kembali dengan Jepang

4. - Udang yang diimpor harus bebas dari logam berat, khususnya merkuri (Hg) dan timbal (Pb).
   - Udang harus segar dan bebas dari hidrogen sulfida (H2S)
   - Udang harus bersih, bebas dari cemaran bakteri
   - Udang harus bebas dari residu hormon dan antibiotik

4.6 Peningkatan Ekspor Perikanan Khususnya Pada Komoditas Udang Dan Tuna Indonesia ke Jepang

Dalam kesepakatan yang telah dilakukan dalam perundingan *Trade in Goods dan Rule of Origin* disepakati adanya peningkatan akses pasar komoditi perikanan ke Jepang. Dari 311 produk perikanan Indonesia yang dinegosiasikan, yaitu 51 jenis produk yang disetujui bea masuknya nol persen merupakan tahap awal karena dalam beberapa tahun ke depan bea masuk akan kembali diturunkan secara bertahap. Sebanyak 72 produk perikanan akan diturunkan bea masuknya ke Jepang secara bertahap. Sebanyak 39 produk akan diturunkan dalam jangka waktu

lima tahun, 32 produk akan diturunkan dalam jangka waktu tujuh tahun, dan satu produk akan diturunkan bea masuknya dalam jangka waktu 10 tahun.

Untuk meningkatkan ekspor perikanan, Jepang membantu Indonesia meningkatkan daya saing produk perikanan. Dalam 2008-2010, Indonesia akan mengirimkan 140 orang mengikuti pelatihan ke Jepang di bidang pengembangan produk, peningkatan mutu serta keamanan produk. Hal ini sangat penting terutama karena konsumen di Jepang sangat sensitif terhadap mutu dan keamanan pangan

Hal tersebut menjadi salah satu dari beberapa indikator dalam meningkatnya ekspor perikanan khususnya pada komoditas udang dan tuna, selain karena udang dan tuna merupakan salah satu andalan ekspor perikanan, peningkatan permintaan pasar terhadap produk-produk laut, baik dari pasar domestik ataupun pasar dunia juga menentukan meningkat atau tidaknya ekspor perikanan di Indonesia

4.7 Dampak Positif IJEPA Dalam Meningkatkan Nilai Ekspor Perikanan Indonesia

Di samping komoditas kelapa sawit dan batu bara, Indonesia juga terdepan dalam produk perikanan dan kelautan. Meski pangsa ekspornya belum sebesar komoditas tambang atau perkebunan, potensinya berpeluang untuk lebih dikembangkan.

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor primer yang mampu tumbuh positif di tengah terpaan krisis. Saat itu pertumbuhan sektor perikanan memang

sedikit melambat dari 5,4 persen (2007) menjadi 5,1 persen (2008). Seiring pulihnya perekonomian global, pertumbuhannya kembali berekspansi. Di kuartal pertama 2010, sektor perikanan bahkan tumbuh hingga 5,9 persen, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,7 persen.

Sementara itu, kontribusinya terhadap pendapatan nasional tercatat sebesar 3,2 persen. Selain itu, sektor perikanan adalah salah satu sektor ekspor penyumbang devisa nasional. Meski pangsa ekspornya hanya 1,9 persen dari total ekspor nasional, nilai dan volume ekspornya cenderung naik.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dari ekspor suatu negara ke negara lain dalam bentuk barang dan jasa. Indonesia dalam hal ini melakukan suatu kerjasama dengan Jepang dalam kerangka IJEPA.

Dengan ditandatanganinya IJEPA ini juga dapat menjadi keuntungan khusus untuk sektor perikanan, yang paling utama adalah pemerintah melalui Departemen kelautan dan perikanan harus terus menyebarkan informasi tentang IJEPA, apa dan bagaimana teknisnya kepada para pelaku usaha agar mereka dapat memanfaatkan kerjasama ini secara maksimal.